

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu keinginan bangsa Indonesia dalam usaha meningkatkan perekonomian, hal ini tertuang dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 alenia ke 4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.<sup>1</sup> Kesejahteraan atau sejahtera dilihat dari aspek ekonomi, yakni orang dikatakan sejahtera apabila memiliki pendapatan dan kekayaan yang berlimpah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sejahtera mengacu pada keadaan aman, sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Sentosa diartikan sebagai keadaan yang bebas dari segala kesulitan dan bencana. Sedangkan makmur berarti hidup berkecukupan atau tidak kekurangan. Dari tiga kata diatas yang termasuk kedalam pengertian sejahtera, hidup dapat dikatakan sejahtera jika sekurang-kurangnya memenuhi 3 syarat, yaitu: (a) bebas dari rasa takut dan cemas (aman), (b) bebas dari kesulitan (sentosa), (c) serba berkecukupan (makmur).<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 pasal 1 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial “Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial”.<sup>3</sup> Negara wajib menjamin kesejahteraan penduduknya dan setiap penduduknya berhak mendapatkan kesejahteraan. Tingkat

---

<sup>1</sup> Rahmawati, Eka Rizki. (2020). *Pengaruh Efektivitas Program Keluarga Harapan Dan Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap* (Doctoral dissertation, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap)

<sup>2</sup> Hasimi, D. M. (2020). Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 1(1), 81-94.

<sup>3</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial*. (2018 ). Dipetik Juli 12, 2023, dari Indonesia Regulation Database: <https://www.regulasip.id/book/10694/read>

kesejahteraan penduduk pada suatu negara memperlihatkan seberapa baik kinerja negara tersebut dalam mencapai tujuannya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pemerintah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan negara yang berkembang dan salah satu masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia yakni masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan ini sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan, masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program yang dibuat sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang ada.<sup>5</sup> Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan nonmakanan. Seseorang dapat dikatakan miskin jika keluarganya memiliki pendapatan kurang dari Rp. 600.000 per bulan. Kemiskinan juga merupakan salah satu indikator yang strategis untuk mengukur keberhasilan pembangunan, kemiskinan dihitung setiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).<sup>6</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang Islam, kemiskinan bukan hanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar saja tetapi kemiskinan juga merupakan salah satu masalah budaya dimana seseorang menjadi miskin karena memiliki perilaku yang buruk, seperti malas bekerja dan berusaha.<sup>7</sup> Islam, sebagai agama *rahmatan lil'alamin* memiliki tanggung jawab besar untuk merespon permasalahan kemiskinan. Sebagai agama

---

<sup>4</sup> Susanto, E. R., Puspaningrum, A. S., & Neneng, N. (2021). Model Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Tekno Kompak*, 15(1), 1-12.

<sup>5</sup> Ferezagia, D. V. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1.

<sup>6</sup> Trinanda, Riska. *Pemanfaatan Dana Bantuan Pendidikan PKH Dalam Upaya Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Di Kelurahan Lebong Gajah Kota Palembang*. (Doctoral dissertation, Sriwijaya University 2021)

<sup>7</sup> Diana, A. (2021). *Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Desa Pante Garot Kecamatan Indraajaya Kabupaten Pidie)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

yang sempurna, Islam sangat peduli terhadap permasalahan kemiskinan. Dalam konteks Negara Indonesia, konstitusi negara juga menyatakan bahwa masyarakat miskin menjadi tanggung jawab negara, seperti yang termaktub secara eksplisit melalui UUD 1945 pasal 34 yang berisi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.<sup>8</sup>

Pada tahun 2019 muncul lah sebuah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia, yaitu virus corona atau dikenal dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*. Dengan adanya covid-19 ini sejumlah negara mengalami perlambatan perekonomian, dan perekonomian global pada tahun 2022 memasuki tahap yang lebih lama dari tahun sebelumnya. Dengan perlambatan perekonomian global tersebut, banyak negara telah mengambil berbagai kebijakan agar tidak masuk pada jurang kemiskinan. Begitu pula dengan perekonomian Indonesia dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan dan pada kuartal III memasuki periode krisis perekonomian, akibatnya daya beli masyarakat menurun. Sehingga pelaku usaha akan mengecilkan produksinya sekaligus tenaga kerjanya untuk menghemat biaya ditengah profit yang semakin sedikit didapatkan. Sehingga akan mengurangi produksi, lapangan pekerjaan dan PDB Nasional yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia yang merupakan lawan dari kemiskinan. Untuk menghindari resesi dan depresi perekonomian tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menopang perekonomian salah satunya kebijakan untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak covid-19.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Kaharudin, M. R., Junaidi, H., & Maftukhatusolikhah, M. (2020). Social Safety Net Pada Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kota Palembang. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 261-274.

<sup>9</sup> Sasmita, A., & Sufiawan, N. A. (2022). “Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kemiskinan Dikelurahan Parit Rintang Kota Payakumbuh.” *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* Vol. 5 No. 1

**Tabel 1.1**

Tabel Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Periode 2018-2022

Tahun		Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2018	Maret	25,95	9,82
	September	25,67	9,66
2019	Maret	25,14	9,41
	September	24,78	9,22
2020	Maret	26,42	9,78
	September	27,55	10,19
2021	Maret	27,54	10,14
	September	26,50	9,71
2022	Maret	26,16	9,54
	September	26,36	9,75

**Sumber:** Badan Pusat Statistik ([bps.go.id](http://bps.go.id))

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2022 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,75% atau sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,03% poin atau sebesar 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14% poin atau sebesar 0,14 juta orang terhadap September 2021.<sup>10</sup> Indonesia termasuk kedalam 100 Negara termiskin di dunia yang berada di urutan ke -73 dengan pendapatan nasional bruto RI tercatat US\$ 3.870 per kapita pada 2022 (*World Population Review*). Sebelumnya Bank Dunia (*World Bank*) mengubah batas garis kemiskinan. Hal ini membuat 13 juta warga Indonesia yang sebelumnya masuk ke dalam golongan menengah ke bawah menjadi jatuh miskin.<sup>11</sup> Beberapa dekade terakhir yang ditandai dengan kemiskinan yang berkepanjangan dan meningkatnya ketidaksetaraan di dalam dunia dan di seluruh dunia. Sebagai tanggapannya, negara-negara yang berkembang telah mengadopsi atau memperluas program perlindungan sosial sebagai upaya untuk menghadapi tantangan

---

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik. (2023, Januari 16). *Persentase Penduduk Miskin September 2022 Naik Menjadi 9,75 Persen*. Dipetik Maret 23, 2023, dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>

<sup>11</sup> CNN Indonesia, T. (2022, September 30). *RI Masuk 100 Negara Paling Miskin di Dunia*. Dipetik Maret 23, 2023, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com>

spesifik berupa peningkatan kemiskinan dan kerentanan yang muncul pada titik-titik tertentu dalam perjalanan hidup individu.<sup>12</sup>

Permasalahan kemiskinan tentu saja juga terjadi di Kota Palembang dimana persentase penduduk miskin di Kota Palembang dari tahun 2018 sampai 2020 terus meningkat.

**Tabel 1.2**  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Palembang Periode 2018-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2018	179,32	10,95
2019	180,67	10,90
2020	182,61	10,89
2021	194,12	11,34

*Sumber: Badan Pusat Statistik (bps.go.id)*

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat jelas bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Palembang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Maret 2021. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, persentase kemiskinan yang cenderung mengalami penurunan. Lonjakan penduduk miskin pada tahun 2021 diduga merupakan salah satu dampak pandemi covid-19, yang diketahui bahwa pandemi covid-19 pertama kali masuk ke kota Palembang pada bulan April tahun 2021. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang beberapa kali dijalankan selama masa pandemi covid-19 berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Larangan masyarakat untuk keluar dan melakukan kegiatan perekonomian tentu berpengaruh pada aktivitas kegiatan perekonomian yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Serta banyak juga perusahaan yang mengurangi jumlah pegawai dan jumlah produksi, yang akhirnya memicu banyak terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan juga pegawai yang dirumahkan untuk sementara. Penduduk

---

<sup>12</sup> Patel-Campillo, A., & García, V. S. (2022). "Breaking the poverty cycle? Conditional cash transfers and higher education attainment" *International Journal of Educational Development*, 92, 102612.

yang terdampak tentu saja kehilangan sumber pendapatan mereka yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.<sup>13</sup>

Jika ada kemiskinan disuatu daerah artinya terdapat ketimpangan sosial yang terjadi pada masyarakatnya, dan untuk itu negara wajib mengetahuinya. Ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat daerah terpencil menyebabkan banyak anak yang seharusnya menjadi pemuda/i penerus bangsa harus mengubur mimpinya dikarenakan ketimpangan sosial ekonomi yang menghambat laju pendidikan sebagian anak dari daerah terpencil. Ketimpangan sosial ini merupakan suatu kondisi dimana ada hal yang tidak seimbang didalam kehidupan masyarakatnya, entah itu secara individu ataupun kelompok.<sup>14</sup>

Di Indonesia maupun di banyak negara berkembang di dunia, upaya untuk penanggulangan kemiskinan memang menjadi sebuah cita-cita bagi setiap pemimpin dan rezim yang memimpin suatu negara, termasuk negara Indonesia. Di negara Indonesia, upaya-upaya yang secara konteks ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan juga terus diluncurkan oleh pemerintah dengan model-model bantuan atau program-program penanggulangan kemiskinan yang secara entitas bersentuhan langsung dengan masyarakat.<sup>15</sup> Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat tersebut dapat hidup dan berkembang dengan baik. Hal ini bermuara akhir tentunya apabila fungsi sosialnya berjalan dengan baik, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup diri dan keluarganya.

---

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik. (2021, Desember 30). *Jumlah penduduk miskin di Kota Palembang Maret 2021 mencapai 194,12 ribu orang*. Dipetik Maret 24, 2023, dari Badan Pusat Statistik: <https://palembangkota.bps.go.id/pressrelease/2021/12/30/934/jumlah-penduduk-miskin-di-kota-palembang-maret-2021-mencapai-194-12-ribu-orang>.

<sup>14</sup> Aris. *Pengertian Kesenjangan Sosial: Bentuk, Faktor, Dampak, dan Solusinya*. Dipetik Maret 24, 2023, dari Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/literasi/kesenjangan-sosial/>

<sup>15</sup> Mattalatta, A. D. (2022) *Analisis Peran Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Pada Masyarakat di Desa Kanco)* (Doctoral dissertation, IAIN Bone)

Konstitusi yang mengamanatkan untuk mensejahterakan rakyat kemudian melahirkan Perpres No. 15 Tahun 2010 yang mengamanatkan dan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), TNP2K merupakan lembaga yang secara langsung berada dibawah kendali Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).<sup>16</sup> Melihat sangat diperlukannya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin inilah, kemudian di tahun 2007 Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) merancang Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebelumnya disebut Raskin.

Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan untuk mengurangi beban pengeluaran dan juga meningkatkan pendapatan keluarga miskin, serta menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta diharapkan untuk memberi ruang leluasa bagi peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga.<sup>17</sup>

BPNT dan PKH merupakan program dibawah kemensos yang melibatkan bank – bank di bawah HIMBARA yang terdiri dari bank BRI, BNI, Mandiri, BPN dan sebagainya, bank tersebut yang bertugas sebagai penyalur bantuan. PKH bebas dimanapun namun untuk BPNT khusus mengambil di agen – agen bank Mandiri. PKH merupakan bantuan bersyarat, bantuan terbawah secara strata sosial sehingga dapat menerima banyak bantuan. Masyarakat yang menerima PKH pasti mendapatkan BPNT namun yang

---

<sup>16</sup> TNP2K. *Kebijakan Percepatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah*. Dipetik November 09, 2022, dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: <http://www.tnp2k.go.id/id/kebijakan-percepatan/tim-koordinasi-penanggulangan-kemiskinan-daerah/tpkd/mengenai-tpkd/>

<sup>17</sup> Andika, S. (2021). Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mekar Delima Kecamatan Tasik Putri Puyu). *Bertuah*, 2(1), 44-55.

mendapatkan BPNT belum tentu mendapatkan PKH. KPM juga harus memenuhi syarat atau kriteria dan tercantum pada DTKS.<sup>18</sup>

Pemerintah mengharapkan penggunaan dana bantuan PKH dan BPNT dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, menunjang pendidikan, pemeliharaan kesehatan dan peningkatan ekonomi keluarga. Namun faktanya, berdasarkan temuan Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia, mayoritas penerima manfaat PKH adalah perokok aktif. Sehingga ditemukan beberapa keluarga penerima manfaat (KPM) yang membelanjakan bantuan untuk membeli rokok. Dengan hasil temuan tersebut, kemungkinan dana bantuan PKH dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) justru mengalir untuk pembelian rokok. Padahal seharusnya dana bantuan PKH wajib dimanfaatkan dengan tepat agar sesuai dengan harapan program. Seperti pidato Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang menjelaskan bahwa penggunaan dana PKH harus digunakan sebagaimana mestinya, misalnya untuk membeli kebutuhan pokok seperti telur, ikan, buku sekolah, seragam anak, sepatu anak yang dapat menunjang pendidikan dan kesehatan keluarga.<sup>19</sup>

Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan di Kota Palembang pada tahun 2011, di tahun pertama tersebut PKH langsung diselenggarakan di 18 Kecamatan Kota Palembang. Pada tahun 2020 jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kota Palembang sebanyak 51.938 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada penelitian ini peneliti memusatkan penelitian pada Kelurahan Kemang Agung yang berada di Kecamatan Kertapati, jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kemang Agung sebanyak 712 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan untuk

---

<sup>18</sup> Rahmawati, Eka Rizki. (2020). *Pengaruh Efektivitas Program Keluarga Harapan Dan Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap* (Doctoral dissertation, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap)

<sup>19</sup> Kaharudin, M. R., Junaidi, H., & Maftukhatusolikah, M. (2020). Social Safety Net Pada Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kota Palembang. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 261-274.



Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai dilaksanakan pada tahun 2015, dengan jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 428 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).<sup>20</sup>

Kelurahan Kemang Agung yang menjadi objek penelitian ini merupakan salah satu kelurahan yang juga memiliki masalah mengenai perekonomian masyarakat. Sehingga untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat tidaklah mudah. Kelurahan Kemang Agung mayoritas masyarakat nya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas yang dimana penghasilannya lebih rendah dibandingkan dengan harga pokok kebutuhan hidup. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam menyeimbangi pemenuhan pokok kebutuhan dengan hasil.

Dalam pelaksanaan Program-Program ini di Kelurahan Kemang Agung, pada saat observasi awal bahwasanya diperkirakan ada beberapa permasalahan, seperti jika dilihat dari kasat mata masyarakat masih ada beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan ini namun kehidupannya tidak memiliki perubahan yang cukup baik dimana masih banyak kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan pokok dan kebutuhan dalam bidang pendidikan dan kesehatan, selain itu pencairan uang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sering tidak tepat waktu, pencairan uang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada dasarnya dicairkan setiap tiga bulan sekali. Namun dalam kenyataannya di lapangan pencairan uang bantuan ini sering terjadi keterlambatan, keterlambatan pencairan dapat terjadi hingga 1 bulan dari jadwal sesungguhnya.<sup>21</sup> hal ini dapat menjadi suatu hambatan bagi Program-Program tersebut untuk mencapai tujuan yang sudah telah direncanakan sebelumnya. Inilah yang kemudian menjadi hal menarik untuk dilakukan analisis lebih mendalam dalam penelitian ini guna mendapatkan hasil

---

<sup>20</sup> Sekretaris Lurah Kemang Agung. (2023, Juli 20). Data Jumlah Penerima PKH dan BPNT Kelurahan Kemang Agung. (Riskah Berliani, Pewawancara)

<sup>21</sup> Wawancara dengan salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) . (2023, November 25). Observasi Awal Mengenai Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Kemang Agung. (R. Berliani, Pewawancara)

tentang bagaimana kemudian Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini diterima dan dirasakan langsung oleh masyarakat penerima manfaat program-program tersebut selama ini.

Penelitian tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Kesejahteraan Masyarakat telah banyak dilakukan sebelumnya. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terdapat perbedaan antara variabel independen yang dipilih dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Maka terdapat research gap sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
Research Gap Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Penelitian</b>
Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai pengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat	• Sandi Andika, 2021
	Program Keluarga Harapan (PKH) Tidak Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	• Lilik Nadhiatul Rodhifah, dan Nur Huri Mustofa 2021

*Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2023*

Program keluarga harapan terhadap kesejahteraan yang diteliti oleh Sandi Andika (2021)<sup>22</sup>, menunjukkan bahwa program keluarga harapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian

---

<sup>22</sup> Andika, S. (2021). Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mekar Delima Kecamatan Tasik Putri Puyu). *Bertuah*, 2(1), 44-55.

dari Lilik Nadhiatul Rodhifah, dan Nur Huri Mustofa (2021)<sup>23</sup>, menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 1.4**  
Research Gap Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap  
Kesejahteraan Masyarakat

	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Penelitian</b>
Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat	• Syafruddin, Muhammad Iqbal, dan Azis Kalrah, (2021)
	Program bantuan pangan non tunai (BPNT) hanya memenuhi kebutuhan ad-dharuriyyat atau kebutuhan pangan saja sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan	• Fahrozi, dan Yovi Novanda (2023)

*Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2023*

Menurut Syafruddin, Muhammad Iqbal, dan Azis Kalrah (2021)<sup>24</sup>, dalam penelitiannya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan penelitian

<sup>23</sup> Nadhifah, L. R., & Mustofa, N. H. (2021). Pengaruh PKH dan BPNT terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 12-24

<sup>24</sup> Syafruddin, S., Iqbal, M., & Kalrah, A. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 9(2), 104-110.

yang dilakukan Fahrozi, dan Yovi Novanda (2023)<sup>25</sup> menunjukkan bahwa Program bantuan pangan non tunai (BPNT) hanya memenuhi kebutuhan ad-dharuriyyat atau kebutuhan pangan saja sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih dalam tentang bagaimana pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan mengangkat judul **“Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang”**

---

<sup>25</sup> Fahrozi, dan Novanda, Y. (2023). Pengaruh Program BPNT Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sukanegara Kecamatan Belitang III (Perspektif Hukum Ekonomi Islam). *HUKAMA: Journal of Islamic Law* Vol. 2 No.1

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas agar penelitian ini dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Apakah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh secara parsial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Kemang Agung ?
2. Apakah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh secara simultan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Kemang Agung ?

## **C. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup wilayah nya hanya meliputi Kelurahan Kemang Agung
2. Luas lingkup informasi hanya seputar Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti tinjauan pada :

1. Untuk mengetahui apakah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh secara parsial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Kemang Agung

2. Untuk mengetahui apakah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh secara simultan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Kemang Agung

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hal yang sangat penting dari penelitian ialah memberikan manfaat yang bisa diperoleh atau dirasakan setelah selesai penulisan penelitian. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Peneliti

Dapat mengetahui secara langsung Pengaruh Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

- b. Civitas Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Pada segi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan berpikir bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan banyak evaluasi dan optimalisasi di jajaran Kementerian-Kementerian terutama Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berkaitan dengan program- program penanggulangan kemiskinan.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang digunakan, dan studi relevan. Bab ini juga membahas mengenai kerangka pemikiran yang melandasi hipotesis penelitian, hipotesis statistik dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan mengenai deskripsi operasional penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisis digunakan dalam penelitian

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil yang didasarkan pada hasil analisis data.

### **BAB V : PENUTUP**

Dibagian bab terakhir dalam skripsi ini, bab ini membahas simpulan hasil penelitian, keterbatasan, dan saran-saran, daftar pustaka.